

Optimalisasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Angsau

Nurholis¹, Taufik Arbain²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Nurholis

E-mail: nurholis0793@gmail.com

Abstrak

Pembangunan daerah dilaksanakan oleh pemerintah baik fisik maupun pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Angsau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di wilayah Kelurahan Angsau dengan pihak informan antara lain lurah, kasi pembangunan, kasi pemerintahan, kasi kemasyarakatan, ketua LPM "Maju Bersama", dan perwakilan masyarakat (Ketua RT / RW). Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penyajian kesimpulan dan verifikasi. Penelitian disimpulkan bahwa optimalisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Angsau menunjukkan hasil yang baik, khususnya pembangunan sarana dan prasarana. Namun terdapat aspek yang perlu dioptimalkan antara lain kurangnya pembinaan dari tingkat kecamatan dan kabupaten serta partisipasi masyarakat.

Kata kunci – Optimalisasi, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Regional development is carried out by the government, both physically and empowering. This research aims to determine efforts to optimize development and community empowerment programs in Angsau Village. The research method used is a descriptive qualitative approach. The research was conducted in the Angsau sub-district area with informants including the village head, development section, government section, community affairs section, head of the "Maju Bersama" LPM, and community representatives (RT/RW heads). Data collection uses observation, interviews and documentation methods. Data was analyzed through the stages of data reduction, data presentation, conclusion presentation and verification. The research concluded that the optimization of community development and empowerment programs in Angsau Village showed good results, especially the development of facilities and infrastructure. However, there are aspects that need to be optimized, including the lack of guidance from the sub-district and district levels and community participation.

Keywords - Community Empowerment, Development, Optimization

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah harapan masyarakat untuk menjadi bagian proses menuju kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat dari semua kalangan, baik masyarakat ekonomi menengah ke bawah hingga ke atas, dari masyarakat dengan pendidikan rendah hingga tinggi, masyarakat dengan latar pekerjaan yang berbeda-beda, semua adalah sama-sama berharap banyak dari pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah (Cangara, 2020).

Pembangunan suatu wilayah, terutama di tingkat kelurahan, memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah menjadi fokus utama pemerintah setempat. Adapun dalam implementasi Permendagri 130 tahun 2018, Kecamatan Pelaihari menyusun program pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari tiga kegiatan utama yang saling terkait dan saling mendukung, yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan evaluasi kelurahan. Melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya ditingkatkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, ketiga kegiatan ini saling melengkapi dan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kelurahan Angsau.

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu provinsi yang di dalamnya memiliki wilayah kelurahan dan desa, sehingga kelurahan di Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2019 telah diberikan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dengan besaran minimal serendah-rendahnya dana desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dana yang didapatkan cukup besar untuk memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan evaluasi kelurahan. Kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya adalah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Evaluasi Kelurahan, dimana ada 5 (lima) kelurahan di Kabupaten Tanah Laut yang mendapatkan anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil observasi, satu kelurahan yang mendapatkan dana kelurahan di Kabupaten Tanah Laut adalah Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, yaitu total sebesar Rp 5.393.696.645,-.

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait pembangunan di kelurahan yaitu penelitian optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari (Nurulsyam & Mutholib, 2021) dengan hasil penelitian adalah: 1) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Linggasari belum dilakukan secara optimal. 2) Adanya hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana 3) Adanya upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut beberapa data awal di atas, baik data penduduk dan wilayah, Kelurahan Angsau dituntut untuk melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan maksimal meskipun dengan kondisi anggaran yang belum maksimal. Pertama, infrastruktur sarana dan prasarana di Kelurahan Angsau perlu dioptimalkan agar dapat mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat secara lebih efektif. Dalam konteks ini, perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan harus diselaraskan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Kedua, pemberdayaan masyarakat menjadi aspek krusial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Kelurahan Angsau. Pemberdayaan ini melibatkan peningkatan kapasitas, keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan aksesibilitas terhadap sumber daya dan peluang. Namun meskipun dana program pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Angsau lebih banyak dibandingkan kelurahan lain, jika dikaitkan dengan kepadatan penduduk maka perlu optimalisasi pada pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan tersebut agar pembangunan dapat dilaksanakan diberbagai wilayah dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata bagi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

penduduk di Kelurahan Angsau. Ketiga, perlu adanya optimalisasi pelaksanaan evaluasi kelurahan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan partisipasi dalam perbaikan pembangunan kelurahan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Optimalisasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan menggambarkan optimalisasi program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2019. Adapun kegiatan pada program pemberdayaan masyarakat dilakukan Kelurahan Angsau yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan evaluasi kelurahan. Subjek narasumber dalam penelitian ini antara lain lurah, kasi pembangunan, kasi pemerintahan, kasi kemasyarakatan, ketua LPM “Maju Bersama” dan perwakilan masyarakat (ketua RT atau RW). Pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, penyajian kesimpulan dan verifikasi. Selain itu, data diuji keabsahan kredabilitas dengan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Angsau terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu: **Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kegiatan Evaluasi Kelurahan**. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka berikut adalah hasil dan pembahasan yang diuraikan berdasarkan ketiga kegiatan tersebut:

1. Optimalisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Angsau

Pada tahap perencanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Angsau, optimalisasi proses pengumpulan usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi langkah kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Proses ini dimulai dengan pengumpulan usulan dari berbagai lapisan masyarakat, di mana aspirasi dan kebutuhan warga disampaikan melalui forum Musrenbang yang bersifat partisipatif, seperti apa yang dikatakan oleh Maryani & Nainggolan (2019) “Participation” ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, “*To Participate*” adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, “*participation*” adalah hal mengambil bagian”. Setiap usulan yang diterima kemudian dipilah berdasarkan beberapa kriteria utama, termasuk tingkat urgensi, manfaat jangka panjang, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan kelurahan.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui kelurahan biasanya adalah proyek-proyek yang berskala kecil hingga menengah, yang dapat dikelola dengan sumber daya dan kapasitas yang ada di tingkat kelurahan. Proyek-proyek ini termasuk perbaikan jalan lingkungan, pembangunan fasilitas umum seperti posyandu dan taman bermain, serta proyek-proyek pemberdayaan lainnya yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Dengan melaksanakan kegiatan ini secara langsung, kelurahan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, proses perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Angsau melibatkan serangkaian langkah strategis untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dan pengelolaan yang efisien. Salah satu aspek penting dalam perencanaan ini adalah optimalisasi pengumpulan usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pemilahan usulan kepada pihak-pihak yang tepat, termasuk DPRD, dinas teknis, dan kelurahan.



Gambar 1.

Optimalisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Angsau

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu tanda bahwa adanya transparansi publik tentang rencana pembangunan, dan menjadikan masyarakat sebagai peserta pembangunan, bukan hanya sebatas penonton dan penikmat hasil pembangunan. Masyarakat yang tidak dilibatkan atau tidak berpartisipasi dalam pembangunan, berkecenderungan tidak merasa memiliki pada hasil pembangunan. Robert dalam Abe (2002) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan, yang dibagi atas perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas masyarakat.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Angsau, langkah strategis yang diambil adalah mencantumkan proses swakelola tipe 4 langsung dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan, penerapan swakelola tipe 4 memungkinkan kelurahan untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembangunan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Dalam konteks ini, proyek-proyek seperti pembangunan jalan dan bangunan sumur bor menjadi fokus utama. Pembangunan jalan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga, memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, pembangunan bangunan sumur bor menyediakan akses air bersih yang sangat penting untuk kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan pipa air umum.

2. Optimalisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Angsau juga mengikuti tahapan kebijakan yang sistematis, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat dan penyusunan program yang tepat sasaran. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pemberdayaan ini diimplementasikan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak dari program pemberdayaan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan guna mencapai tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Menurut Permendagri Nomor 130 tahun 2018 bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi: a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat; dan/atau f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya. Adapun di Kelurahan Angsau, anggaran pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terbagi untuk memfasilitasi diantaranya kegiatan posyandu termasuk pembayaran honorarium kader posyandu dan penyediaan PMT, kemudian juga ada pembinaan PKK, sisanya adalah pelaksanaan pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk masyarakat.

Optimalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Angsau salah satunya dilakukan melalui pemberdayaan narasumber pelatihan dari warga sekitar kelurahan. Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya manusia lokal yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus, sehingga mereka dapat berbagi ilmu dan pengalaman dengan sesama warga.



Gambar 2.

Dokumentasi Pelatihan Rangkaian Pernikahan Adat Banjar tahun 2021



Gambar 3.

Dokumentasi Pengumuman Seleksi Peserta Pelatihan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Secara keseluruhan, optimalisasi pemberdayaan narasumber pelatihan dari warga sekitar kelurahan menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembangunan. Mereka menjadi agen perubahan yang turut membentuk masa depan kelurahan dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

3. Optimalisasi Kegiatan Evaluasi Kelurahan

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Di Kelurahan Angsau, kegiatan evaluasi ini sebagian besar terdiri dari kegiatan wajib tahunan yang meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan, pembuatan profil kelurahan, dan

pembayaran honorarium ketua RT dan RW. Selain itu, terdapat juga kegiatan pelatihan atau sosialisasi yang berhubungan dengan aktivitas pemerintahan seperti pertanahan, keamanan, dan ketertiban.

Adapun berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa upaya optimalisasi yang dilaksanakan Kelurahan Angsau dalam Kegiatan Evaluasi Kelurahan ini antara lain optimalisasi tamu undangan musrenbang dan optimalisasi pelaksanaan musrenbang.

Dalam forum ini, perencanaan pembangunan kelurahan dibahas secara rinci, dan evaluasi konflik lapangan sering diintegrasikan ke dalamnya melalui berbagai bentuk sosialisasi. Misalnya, sosialisasi mengenai konflik pertanahan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, forum ini juga digunakan untuk membahas pembayaran honorarium bagi petugas Musyawarah Desa Kelurahan (MDK) serta honorarium ketua RT dan ketua RW. Jenis kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang bervariasi setiap tahunnya, bergantung pada usulan masyarakat dan pertimbangan kelurahan.

Dengan banyaknya usulan Musrenbang yang tidak sebanding dengan alokasi dana yang tersedia, Kelurahan Angsau berupaya mengoptimalkan undangan peserta Musrenbang. Upaya ini dilakukan dengan mengundang seluruh anggota DPRD yang terpilih di daerah pemilihan (dapil) tersebut, yang memiliki dana aspirasi. Selain itu, dinas-dinas penting seperti Bappeda, Dinas PUPR, Dinas DPRKPLH, dan Puskesmas Pelaihari juga diundang untuk memastikan dukungan penuh terhadap pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kelurahan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usulan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan lebih efektif dan efisien.

Upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Angsau yaitu tidak hanya fokus pada undangan resmi dari pihak pemerintah, tetapi juga berusaha membuat acara tersebut lebih menarik dan partisipatif. Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengundang komunitas seni untuk mengisi acara. Dengan demikian, Musrenbang tidak hanya menjadi forum diskusi yang formal, tetapi juga sebuah acara yang meriah dan menarik perhatian masyarakat.

Selain upaya optimalisasi, peneliti juga menemukan upaya yang belum ada dan belum optimal yaitu pada pelaksanaan pembuatan profil, yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau pihak lain yang ingin mendapatkan data tersebut dengan nyaman dikarenakan hanya berupa cetakan buku yang tidak menarik dan tidak mengundang minat baca masyarakat. Padahal profil kelurahan adalah media yang dapat dimanfaatkan dalam menyamoakan informasi terkait kondisi kelurahan.

Pada penelitian faktor pendukung dan faktor penghambat, peneliti lebih mengambil dan menyimpulkannya berdasarkan garis besar hasil-hasil wawancara dari para narasumber, adapun hasil tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
 - a. Komunikasi

Hasil observasi peneliti bahwa pada pelaksanaan program ini, komunikasi antar ASN kelurahan sangat bagus, sehingga dapat menyelesaikan banyak kegiatan dengan tingkat realisasi pelaksanaan yang selalu hampir sempurna setiap tahunnya., jika tanpa komunikasi yang baik tentu akan sulit menyelesaikan banyak pekerjaan yang cukup rumit dan melibatkan banyak orang, Bukan hanya komunikasi internal, melainkan juga eksternal. Kelurahan yang memiliki saluran komunikasi terbuka antara pihak kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan warga dapat memastikan bahwa informasi mengenai program dan kebijakan yang ada dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Komunikasi yang baik juga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan warga, mengumpulkan masukan, serta menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi warga dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Sumber Daya Fasilitas

Ketersediaan sumber daya fasilitas seperti gedung pertemuan, alat-alat pelatihan, dan infrastruktur lainnya sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan, seperti yang disampaikan oleh fasilitas yang memadai memungkinkan kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan berbagai program lainnya dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien. Misalnya, gedung pertemuan yang layak dan dilengkapi dengan peralatan presentasi dapat memfasilitasi kegiatan musyawarah dan pelatihan dengan lebih efektif. Selain itu, fasilitas yang baik juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan.

c. Sumber Daya Manusia (Staff)

Sumber daya manusia, yang meliputi staff dan pejabat kelurahan, pejabat pengadaan UKPBJ, LPM, serta ketua RT/RW, merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Kompetensi, dedikasi, dan kemampuan berkomunikasi dari setiap elemen ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program. Dengan adanya kolaborasi yang baik dan koordinasi yang efektif di antara semua pihak, program pemberdayaan dapat berjalan dengan lebih lancar, memberikan manfaat yang nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan yang memadai adalah pilar penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan di kelurahan. Akses informasi yang baik memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis data dan tepat sasaran, sementara kewenangan yang cukup memungkinkan kelurahan untuk bertindak cepat dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan. Kombinasi dari kedua faktor ini menjadikan kelurahan lebih responsif dan adaptif dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan optimalisasi sumber daya informasi dan kewenangan, program pemberdayaan dapat berjalan lebih lancar, efektif, dan memberikan hasil yang signifikan bagi warga kelurahan.

e. Lokasi Wilayah Kelurahan yang Strategis

Kelurahan yang terletak di pusat kecamatan Pelaihari yang merupakan pusat Kabupaten Tanah Laut, sehingga memiliki akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai fasilitas umum dan infrastruktur. Hal ini mencakup jalan yang baik, transportasi umum yang tersedia, serta kedekatan dengan pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan kantor-kantor pemerintah. Aksesibilitas yang baik ini memudahkan warga kelurahan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, sosialisasi kesehatan, dan kegiatan komunitas lainnya.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan dan rencana yang telah disusun dalam program pemberdayaan. Akibatnya, banyak kegiatan yang harus ditunda atau dibatalkan, dan prioritas harus diberikan pada kegiatan yang dianggap paling mendesak atau penting. Keterbatasan anggaran ini juga dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan program, karena kelurahan harus mencari cara untuk menghemat biaya, yang mungkin berdampak pada hasil akhir dari kegiatan pemberdayaan.

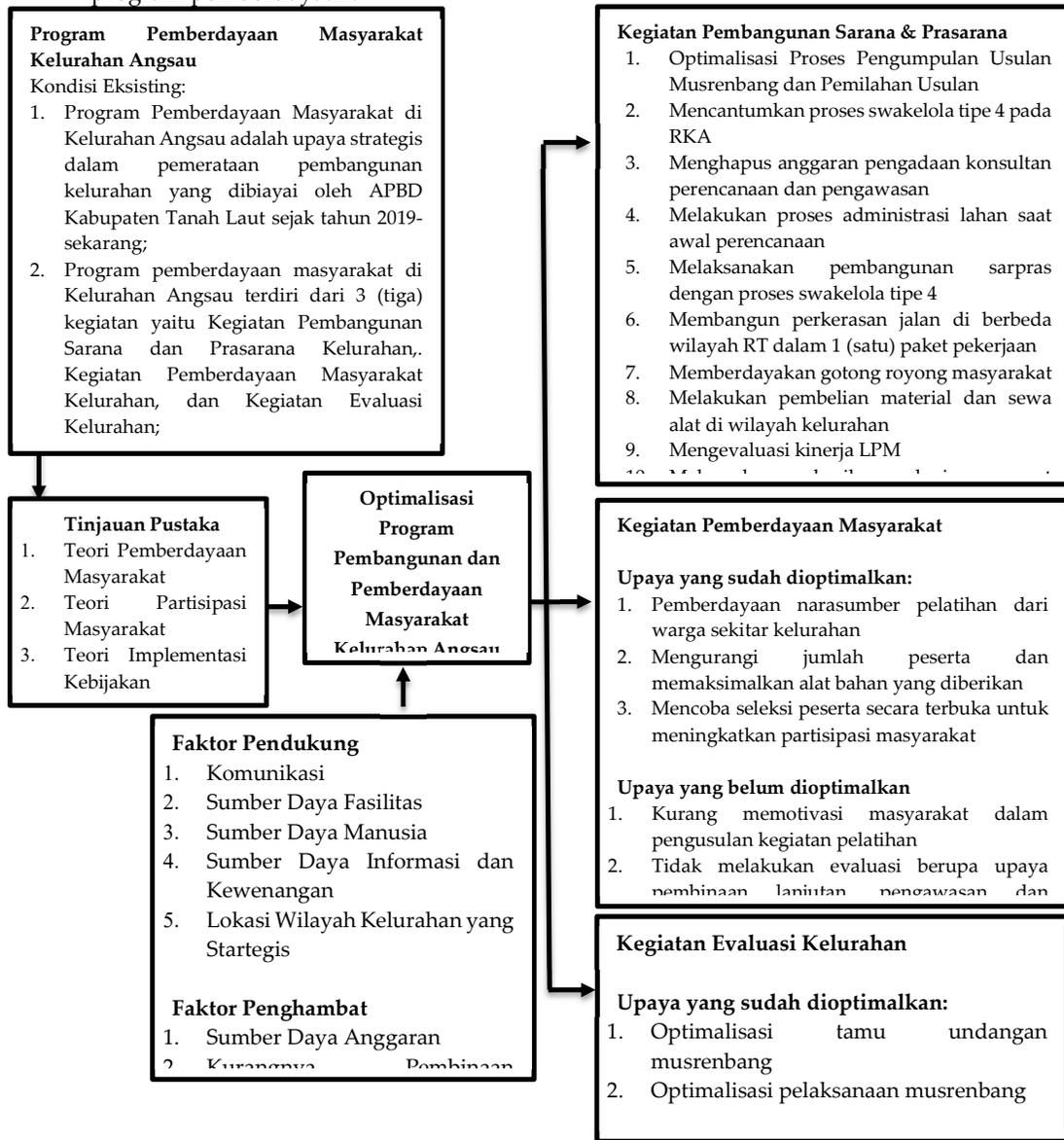
b. Kurangnya Pembinaan Kecamatan dan Kabupaten

Pembinaan yang kurang intensif dan tidak konsisten membuat kelurahan kesulitan dalam mendapatkan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan program-program mereka. Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara kelurahan dengan kecamatan dan kabupaten dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kebijakan atau bahkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan program. Hal ini membuat

kelurahan harus bekerja dengan lebih keras untuk mencari solusi sendiri tanpa dukungan yang memadai dari tingkat yang lebih tinggi.

c. Partisipasi Masyarakat

Ketidakpedulian, kurangnya kesadaran, atau apatisme dari warga terhadap program-program yang dijalankan oleh kelurahan khususnya pada perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan evaluasi pada kegiatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akan sulit memberikan kontribusi yang maksimal. Selain itu, rendahnya partisipasi juga dapat disebabkan oleh kurangnya informasi atau sosialisasi yang efektif dari pihak kelurahan mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam program-program pemberdayaan.



Gambar 4.

Optimalisasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Angsau

KESIMPULAN

Optimalisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Angsau telah menunjukkan hasil yang baik, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana melalui mekanisme swakelola tipe 4. Namun, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan evaluasi kelurahan masih memerlukan perbaikan. Beberapa aspek, seperti kurangnya pembinaan dari tingkat kecamatan dan kabupaten serta partisipasi masyarakat yang belum optimal, perlu mendapat perhatian lebih. Optimalisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Angsau sudah cukup baik dikarenakan faktor-faktor pendukung dimanfaatkan dengan maksimal untuk meminimalkan dampak dari faktor-faktor penghambat, sehingga meskipun terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan evaluasi kelurahan, secara keseluruhan upaya optimalisasi ini telah menunjukkan hasil yang positif.

Saran penelitian meningkatkan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Angsau antara lain peningkatan anggaran dengan mengupayakan penambahan alokasi anggaran, Peningkatkan pembinaan dan dukungan dengan mengadakan program pelatihan rutin dan pendampingan, peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan secara lebih aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta pemanfaatan lokasi yang strategis dengan mengoptimalkan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber dalam penelitian ini antara lain lurah, kasi pembangunan, kasi pemerintahan, kasi kemasyarakatan, ketua LPM "Maju Bersama" dan perwakilan masyarakat (ketua RT atau RW) Kelurahan Angsau. Selain itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing penelitian dan Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukatif.
- Afandi & Erdayani. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. osf.io. <https://osf.io/qf5hr/download>
- Anjar, Agus. (2018). *Problematika Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Assa, C. M. D., Lopian, M., & Singkoh, F. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31812>
- Cangara, H. (2020). *Komunikasi Pembangunan: Telaah Untuk Memahami Konsep, Filosofi, Serta Peran Komunikasi Terhadap Pembangunan dan Pembangunan Komunikasi dalam Era Digital*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Effendi, Bachtiar. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*, Yogyakarta: Uhaindo dan Offset.
- Fadillah, I. (2023). *Evaluasi program pembangunan infrastruktur di Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru Kota Bandung*. etheses.uinsgd.ac.id. <https://etheses.uinsgd.ac.id/69438/>
- Ghony, Djunaidi. M & Almanshur, Fauzan. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hikmat, Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Lathifaturrodiyah, L., Cikusin, Y., & Rahmawati, S. D. (2022). PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Pada Kelurahan Gombongsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten *Respon Publik*. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/18733>

- Labolo, Muhadamm. (2022). *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian Awal*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Maryani, Dedeh & Nainggolan, Ruth Roselin E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: CV Budi Utama.
- Morissan (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nur, U. A., & Rahaju, T. (2020). Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. In *Publika*. ejournal.unesa.ac.id.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/36900/32851>
- Nurulisyam, A., & Mutholib, A. (2021). *Optimalisasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. repository.unigal.ac.id.
<http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/884>
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kelurahan
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan
- Rahardian, Ramaditya. (2022). *Studi Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Isu Kontemporer*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. (2021). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sari, R. D. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Repo-Mhs.Ulm.Ac.Id*. <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/38695>
- Siburian, L., Simamora, P. sawenny, & ... (2022). ... KELURAHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN MADRAS HULU KECAMATAN In *JURNAL* jurnal.darmaagung.ac.id.
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/download/2347/2186>
- Soleh, Chabib. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Fokusmedia: Bandung.
- Suaib. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Suharto, Edi. (2021). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. (2009). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sinar. Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Yuwono, Teguh. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: Pusat Kajian Otonomi Daerah & Kebijakan Publik*. Semarang: UNDIP.